

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan automasi akreditasi di Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau melalui 3 (tiga) aspek model implementasi yang diadopsi dari Teori Grindle, Muñoz & Bolívar serta Edward III yaitu rencana strategis, kepatuhan dan daya tanggap yang tinggi, dan sumber daya yang memadai (sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan) nyatanya menjadi faktor-faktor keberhasilan kebijakan tersebut.

Dalam konteks rencana strategis, implementasi automasi akreditasi menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pedoman dalam mengembangkan dan mengimplementasikan automasi akreditasi secara terarah. Kepmendikbud tersebut untuk mengatur tentang transformasi sistem akreditasi. BAN S/M sebagai lembaga yang memiliki otoritas menggunakan media komunikasi untuk mencapai keberhasilan implementasi.

Berdasarkan temuan peneliti, pemerintah telah berupaya mengkomunikasikan kebijakan. Bentuk komunikasi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah adalah dengan mengunggah rencana strategis ke dalam laman resmi yang dapat diakses secara umum, membuat video sosialisasi mengenai otomatisasi akreditasi dalam kanal Youtube, hingga membuka komunikasi secara intens melalui media sosial. Meskipun demikian, peneliti menemukan indikasi rendahnya pemahaman yang dimiliki satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran kebijakan. Indikasi yang ditemukan oleh peneliti ini disebabkan karena rendahnya literasi yang mempengaruhi kualitas informasi mengenai automasi akreditasi, sehingga informasi kerap tidak diterima secara utuh oleh satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya implementasi automasi akreditasi terutama untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan. Karenanya, pemerintah perlu merancang mekanisme sosialisasi untuk satuan pendidikan dalam membangun komitmen mengimplementasikan automasi akreditasi.

Dalam perspektif kepatuhan dan daya tanggap. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi automasi akreditasi dapat berjalan secara optimal jika implementor dan

kelompok sasaran kebijakan dapat memahami bisnis proses automasi akreditasi. Pembangunan SISPENA memiliki maksud agar satuan pendidikan lebih fokus dalam melakukan perbaikan kualitas pendidikan, bukan hanya berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana. Automasi akreditasi mendorong satuan pendidikan untuk melakukan evaluasi diri berkala. Evaluasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi kekurangan untuk perbaikan kualitas mutu di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil temuan, dua dari lima informan mengalami indikasi resistensi yang disebabkan dari ketidakpercayaan akan hasil penilaian akreditasi. Selain itu, peneliti menemukan bahwa regulasi untuk automasi akreditasi dianggap masih lemah karena tidak mengatur tentang mekanisme implementasi automasi akreditasi. Hal ini dapat menyebabkan implementasi automasi akreditasi dapat terhambat. Untuk melemahkan resistensi dan rendahnya pemahaman automasi akreditasi, pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan automasi akreditasi melalui peraturan menteri.

Dari aspek sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sumber daya manusia di satuan pendidikan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Operator Sekolah cukup memadai dalam mendukung terlaksananya automasi akreditasi. Meskipun demikian, terdapat kendala teknis yang terjadi, dimana satuan pendidikan melimpahkan seluruh beban pekerjaan terkait akreditasi dilimpahkan ke operator sekolah. Sedangkan keterampilan teknis operator tidak diikuti dengan tingkat pemahaman substansi dan regulasi automasi akreditasi.

Dalam hal aspek sumber daya keuangan, akreditasi konvensional dianggap lebih mahal karena untuk menentukan status akreditasi dilakukan visitasi. Aktivitas visitasi ini diketahui memerlukan anggaran yang besar. Pemerintah perlu mengeluarkan anggaran rata-rata sebanyak Rp6.024.158/satuan pendidikan dalam pelaksanaan akreditasi konvensional. Sedangkan untuk pelaksanaan automasi akreditasi, rata-rata anggaran yang diperlukan adalah sebanyak Rp1.262.355/satuan pendidikan. Terjadi penurunan biaya tersebut, dibenarkan oleh satuan pendidikan, dimana pelaksanaan akreditasi konvensional banyak memerlukan anggaran seperti honorarium, biaya transportasi, dan akomodasi. Selain itu, komponen yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan terbebani untuk pengadaan berkas, konsumsi, dan lainnya. Automasi akreditasi lebih murah dibandingkan dengan akreditasi konvensional. Hal ini dapat membuat automasi akreditasi lebih mudah diterima oleh implementor dan kelompok sasaran kebijakan untuk diimplementasikan.

Terkait sumber daya peralatan, sasaran penelitian yang berasal dari Sekolah Menengah Atas di Provinsi DKI Jakarta disimpulkan bahwa satuan pendidikan tidak terdapat kendala

yang berarti. Hal ini disebabkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan mutu, sarana, dan prasarana pendidikan yang baik di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam akreditasi tidak menjadi kendala dan sudah sangat memadai.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, 5 (lima) indikator diatas memiliki dampak terhadap keberhasilan automasi akreditasi dalam memperbaiki mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan manfaat dari automasi akreditasi adalah agar satuan pendidikan memiliki akses data dalam melakukan pengembangan dan memperbaiki kualitas pendidikan diri. Karenanya, automasi harus dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah dianalisis oleh peneliti sebagai bentuk menghindari hambatan dan tantangan implementasi. Automasi akreditasi dilakukan untuk satuan pendidikan yang sudah pernah diakreditasi. Berdasarkan temuan mengungkapkan bahwa automasi akreditasi memungkinkan untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang akan diakreditasi awal. Hal ini ditunjukkan bahwa data yang diperoleh dari automasi akreditasi adalah berasal dari data-data sekunder. Meskipun demikian, peneliti menganggap bahwa untuk dapat mengimplementasikannya, automasi akreditasi memerlukan penguatan data sekunder terutama dari AN yang diperoleh dari penilaian semua jenjang.

Automasi akreditasi merupakan kebijakan yang memiliki dampak positif dalam memperbaiki mutu pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa aspek yang mendukung penguatan mutu antara lain: (1) Proses automasi akreditasi yang lebih cepat dan efisien ini mampu memangkas lamanya waktu persiapan, sehingga satuan pendidikan tidak disibukkan dengan kegiatan yang mengganggu pembelajaran; (2) Automasi akreditasi dinilai menggunakan mekanisme penilaian yang lebih akurat dan konsisten. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan melakukan isian berkala secara mandiri yang sesuai dengan kondisi sebenarnya; (3) Pengawasan dan monitoring melalui sistem *dashboard monitoring* memudahkan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mengetahui dan melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan; (4) Satuan pendidikan dapat dengan cepat mengidentifikasi aspek yang membutuhkan perbaikan dan dapat segera melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui pengajuan re-akreditasi; dan (5) Automasi akreditasi menggunakan sistem otomatisasi, data dan informasi terkait akreditasi dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan oleh semua pihak yang terkait. Hal ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses akreditasi. Berdasarkan kelima aspek diatas, pada dasarnya satuan pendidikan telah memulai perbaikan mutu pendidikan melalui terbangunnya kesadaran dan motivasi untuk mengimplementasikan automasi akreditasi secara optimal.

5.2. Saran

Tujuan automasi akreditasi diawali untuk menuntaskan tunggakan akreditasi (*backlog*). Seiring berjalannya waktu, automasi akreditasi dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan menumbuhkan budaya mutu di satuan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini membawa dampak baik bagi satuan pendidikan dari sisi efektivitas penilaian maupun efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang akan memperkuat implementasi automasi akreditasi kedepan, sebagai berikut:

- 1) Perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri yang membahas mengenai mekanisme automasi akreditasi. Saran ini bertujuan untuk memperbaiki budaya mutu dari satuan pendidikan agar patuh dalam mengimplementasikan kebijakan automasi akreditasi. Saran penelitian mengenai dikuatkannya regulasi ini ditujukan untuk memperbaiki budaya mutu pendidikan.
- 2) Perlu adanya mekanisme sosialisasi yang efektif untuk memastikan kesesuaian pemahaman satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran kebijakan, sehingga dapat meminimalisir kendala di lapangan.
- 3) Perlu adanya komitmen bersama dari tingkat pusat hingga kelompok sasaran untuk menjadikan automasi akreditasi sebagai dasar perbaikan mutu di satuan pendidikan, sehingga menjadi upaya menumbuhkan budaya mutu.
- 4) Perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap implementasi automasi akreditasi dengan kategori wilayah sasaran yang belum memadai dari sisi aspek SDM, anggaran, hingga sarana dan prasarana.
- 5) Perlu adanya rancangan untuk penguatan data Asesmen Nasional dan diperuntukan oleh setiap jenjang pendidikan. Hal ini agar memungkinkan automasi akreditasi diimplementasikan bukan hanya untuk satuan pendidikan yang akan direakreditasi, namun juga untuk satuan pendidikan yang diakreditasi.